

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akbarsyah, D.N., 2005, *Komite Nasional Indonesia Pusat: Parlemen Indonesia 1945-1950*, Yayasan Risalah, Jakarta.
- Amirudin, A.Z., 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, B., 2004, *Metode Penelitiian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asshiddiqie, J., 2006, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Azhary, T., 1994, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Tentang Unsur-Unsurnya*, UII Press, Yogyakarta.
- _____, 2010, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Budiarjo, M., 2010, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Busroh, A.D., 1990, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- C, A., 2011, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Pubishing, Malang.
- Hakim, A.A., 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Haris, S., 1994, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*, LP3ES, Jakarta.
- Huda, N., 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta.
- Kansil, C.T., 1985, *Hukum Tata Pemerintahan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Kusnardi, M. dan Saragih, R. B., 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Manan, B., *Teori dan Politik Konstitusi*, Direktorat Pendidikan Tinggi, Jakarta.
- Marzuki, P.M., 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

- Mahfud, M., 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nasution, B.J., 2011, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Poerbopranoto, K., 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, PT Erasco, Bandung.
- Putra, E.J., 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup*, Rajawali Pers, Depok.
- Rahardjo, S., 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.
- Riwanto, A., 2016, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Safa'at, M.A., 2011, *Pembubaran Partai Politik, Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soekanto, S., 1975, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta
- _____, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, S., Mamuji, S., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suseno, F.M., 1999, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia, Jakarta.
- Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wahjono, P. 1991, *Membudayakan UUD 1945*, IND HILL-Co, Jakarta.
- _____, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, IND HILL-Co, Jakarta.

Jurnal

- Arrsa, R. C, "Rekonstruksi Paradigmatik Negara Hukum Pancasila". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 8, Nomor 4, September 2013.
- Rachman, M. A, "Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik". *Jurnal Yuridika*, Vol. 31, Nomor 2, Mei 2016.

Tugas Akhir

Luhulima, Elvina, 2017, *Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Pemerintah Pusat Selaku Pemohon Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Presidensial di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman.

Masruri, Muhammad Bahaudin, 2012, *Kajian Yuridis Tentang Pembubaran Partai Politik Menurut Pengaturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.

Ristyawati, Aprista, 2017, *Analisis Hukum Mengenai Legal Standing Pemohon Dalam Perkara Pembubaran Partai Politik Di Indonesia Sebagai Wujud Negara Demokratis*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

Safa'at, M. A, 2009, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia (Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik 1959-2004)*, Disertasi, Universitas Indonesia, Depok.

Artikel Koran

Husein, Harun, "Menambah Lagi Kursi DPR?", *Republika*, 8 Desember 2011.

Internet

Constitutional Court of Korea, "Dissolution of Unified Progressive Party Case", <http://english.ccourt.go.kr/cckhome/eng/decisions/majordecisions/majorDetail.do?searchClassCode=ENEXECLSS&searchClassSeq=480#none> diakses 25 Juni 2018.

Deutscher Bundestag, "Basic Law for The Federal Republic of Germany", <https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80201000.pdf> diakses 25 Juni 2018.

Dewan Perwakilan Rakyat, "Sejarah Terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.", <http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr> diakses 22 Mei 2018.

Hamdan Zoelva, "Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila", <https://hamdanzoelva.wordpress.com/2009/05/30/negara-hukum-dalam-perspektif-pancasila> diakses 22 Mei 2018.

Venice Commission, “Guidline on Prohibition and Dissolution of Political Parties.”, [http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLIN F\(2000\)001-e](http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDLIN F(2000)001-e) diakses 17 Mei 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1959 Tentang Syarat-Syarat Dan Penyederhanaan Kepartaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 149, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1916)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1960 Tentang Pengakuan, Pengawasan dan Pembubaran Partai-Partai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 79 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 2016)

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 Tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme (TAP MPRS Tahun 1966)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3062)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3809)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-IX/2011 perihal pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik